

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sudut pandang kesatuan akuntansi, badan usaha dipersonifikasikan seperti layaknya manusia yang mampu bertindak atas namanya sendiri baik dalam hukum, ekonomi maupun bertanggungjawab kepada pemilik. Personifikasi seperti layaknya manusia berarti akan terdapat dua bentuk perilaku, yaitu perilaku yang mengarah pada perbuatan taat hukum atau perilaku yang mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum. Dikatakan sebagai perbuatan taat hukum biasanya karena perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan norma-norma, adat-istiadat, atau peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Perbuatan taat hukum adalah merupakan cita-cita ideal bagi setiap manusia karena akan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Senada dengan hal tersebut, cita-cita ideal sebuah perusahaan adalah mengarah-kan individu-individu yang terlibat di dalamnya untuk berperilaku taat hukum demi kepentingan bersama yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.

Sebaliknya perilaku yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum bisa terjadi pada siapa saja. Dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum karena perbuatan tersebut dianggap melanggar norma-norma, adat-istiadat, atau peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. Jika berdasarkan fakta hukum benar-benar terjadi pelanggaran terhadap norma-norma, adat-istiadat, atau peraturan-peraturan setempat, diperlukan upaya penegak hukum untuk membuat efek jera pelakunya dengan cara memberi ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya. Menurut sudut pandang hukum yang berlaku secara umum

menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan individu atau kelompok berdasarkan fakta hukum tidak dapat dibebankan kepada pihak individu atau kelompok lain. Senada dengan hal tersebut pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan berdasarkan fakta hukum, akan diberi ganjaran yang setimpal untuk menimbulkan efek jera di mana hukuman tersebut tidak bisa dibebankan kepada pihak lain (pemilik, investor).

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya perusahaan tidak akan luput dari potensi menghadapi konflik hukum tersebut. Konflik hukum dapat berpotensi terjadi pada lingkup internal (misalnya: pelanggaran terhadap hak-hak buruh, penggelapan uang perusahaan) maupun eksternal (misalnya: pencemaran lingkungan, pengemplangan pajak). Konflik hukum yang dihadapi perusahaan biasanya disebabkan dua hal, yaitu: terjadi karena disebabkan oleh kelalaian manajemen atau kesengajaan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Konflik hukum yang dihadapi perusahaan baik internal maupun eksternal, baik disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan berpotensi "dimanfaatkan" oleh pemilik. Dengan dalih perbuatan hukum, pemilik dapat beralibi untuk menghindari konflik hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan alibi perbuatan hukum perusahaan tersebut membuat pemilik "kebal" sehingga bisa leluasa dan terus-menerus menjadikan perusahaan sebagai alat untuk memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara apa pun. Bahkan bisa jadi tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah sebagai alat untuk mengeksploitasi sumber daya pihak lain melalui perusahaan yang dimiliki tersebut.

Dengan tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi perilaku negatif kepada setiap pemilik korporasi, kritik terhadap akuntansi modern yang mengadopsi konsep *entity theory* akan membentuk realitas sebagaimana karakter yang dimiliki oleh *entity theory* (Potter 2005 dan Miller 1994). Yaitu karakter yang mudah dijadikan sebagai alat bagi pemilik untuk mengeksploitasi kekayaan. Artinya, sama saja

akuntansi modern melalui konsep *accounting entity*-nya menciptakan realitas imperialisme atau kapitalis dalam berbagai bentuk (Hauriasi dan Davey 2009; Chew dan Greer 1997; Gibson 2000).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu ciri umum dari sistem akuntansi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah bahwa sistem mereka hanya ekstensi yang secara historis berasal dari negara-negara imperialis/kapitalis Barat, khususnya Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Biasanya sistem ini telah diperkenalkan baik melalui pengaruh kolonial dan/atau kekuatan investor (Hove, 1986; Perera, 1985). Selain itu, praktek akuntansi dan tradisi-tradisi yang digunakan tanpa mempertimbangkan secara serius pada keadaan yang nyata dan kebutuhan negara-negara penerima (Hauriasi dan Davey, 2009). Sementara itu, bukti bahwa adopsi *entity theory* juga membuat permusuhan dengan budaya dan adat istiadat setempat dijelaskan dalam beberapa penelitian sebagaimana yang dirangkum dalam paragraf berikut ini.

Hauriasi dan Davey (2009, 250) merangkum studi-studi tentang akuntansi dan budaya pada beberapa dekade terakhir, bahwa telah nampak peningkatan penelitian yang dilakukan untuk menilai kesesuaian sistem akuntansi Barat yang diimpor ke negara berkembang (lihat juga misalnya Askary, 2006; Briston, 1978; Brown dan Tower, 2002; Chand, 2005; Hove, 1986; Perera, 1989b; Samuels dan Oliga, 1982; Wallace, 1990; Wickramasinghe dan Hopper, 2005). Studi-studi yang telah dilakukan meragukan kemampuan sistem tersebut (praktik akuntansi Barat) untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, sehingga konsekuensinya bagi negara-negara berkembang terpanggil untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, dan berdasarkan keadaan lokal, untuk mengembangkan sistem baru atau memodifikasi yang ada. Mengingat sejarah dominasi imperialisme Barat dan kolonialisme, sulit tanpa mengapresiasi dampak akuntansi dan sistem akuntansi terhadap nilai-nilai budaya dan adat masyarakat.

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi bentuk praktik akuntansi yang jarang terfikirkan oleh pakar akuntansi adalah faktor budaya lokal dan agama. Budaya lokal dan agama suatu wilayah akan memberikan *style* praktik akuntansi yang sedang berjalan. Gagasan-gagasan yang muncul di balik praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh budaya lokal suatu wilayah jelas akan berbeda dengan praktik akuntansi yang dipengaruhi budaya lokal wilayah lain. Praktik akuntansi yang berjalan karena pengaruh budaya Jawa misalnya, jelas akan memunculkan gagasan-gagasan di balik praktik akuntansi tersebut dengan sifat alamiah Jawa. Demikian halnya pengaruh agama terhadap praktik akuntansi akan memunculkan gagasan-gagasan di balik praktik akuntansi yang bersifat agamis.

Budaya menurut Kuntowijoyo (2006, 3) adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengerahan dan pegarahan terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniayah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniyah) dan penghidupan (lahiriah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen diri manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia, baik individu maupun masyarakat ataupun individu dan masyarakat. Soedarjono (2007) membedakan wujud budaya sebagai hasil akal, pikir budi manusia menjadi tiga, yaitu: (1) sebagai suatu yang kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) sebagai suatu yang kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia. (3) sebagai benda-benda hasil karya manusia yang bersifat fisik, seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya.

Sebagai bagian dari dunia, orang Jawa dikenal memiliki kemampuan asimilasi dan adaptasi budaya yang luar biasa. Persinggungan antar-budaya dan agama di seluruh dunia mau tak mau ikut menggoreskan lukisan di wajah budaya dan agama orang Jawa. Akibatnya, terjadilah pengelompokkan aliran, keyakinan, dan pemikiran tentang sejumlah ide dasar spiritualisme. Penelitian Geertz (1960) yang akhirnya

disanggah banyak ahli, tampaknya juga mencoba memahami pemilahan pola pemikiran dan budaya spiritual masyarakat Jawa menjadi *abangan*¹, *santri*², dan *priyayi*³. Kuntowijoyo (1987) menyimpulkan bahwa pada akhirnya semua agama yang berkembang di tanah Jawa pada dasarnya selalu berciri Jawanisme.

Budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan Jawa juga merupakan bentuk akuntabilitas dari segala aktivitas sehari-hari yang di dalamnya juga termasuk aktivitas ekonomi. Akuntabilitas yang berdasarkan nilai-nilai kearifan tersebut tercipta karena rasa kekeluargaan dan gotong royong (Prabowo 2003, 24).

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003, 24) membagi budaya secara garis besar menjadi dua, yaitu: budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan penghitungan empiris atau objektif, tetapi menduduki posisi yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat Jawa. Budaya batin yang dalam klasifikasi menurut Koentjaraningrat (1982, 2) dapat dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersymbolisasikan pada ungkapan *manunggaling kawula-Gusti*.

¹ *Abangan* merujuk kepada orang atau kelompok orang yang menganut tradisi Jawa campuran Hindu-Budha dan animisme serta mistik Islam (Geertz 1960)

² *Santri* merujuk kepada orang atau kelompok orang yang menganut secara ketat ajaran Islam (Geertz 1960)

³ *Priyayi* merujuk orang yang menjadi pegawai pemerintah, yang merupakan elite Jawa (Geertz 1960)

Sikap keagamaan masyarakat Jawa sangat kental dengan keyakinan tentang asal mula kehidupan yang disebut sebagai *sangkan* “asal atau kelahiran” dan *paran* “tujuan hidup”. Pengakuan orang Jawa terhadap Tuhan Sang Pencipta dapat dilihat pada ungkapan-ungkapan yang mengacu pada ketergantungan manusia terhadap Tuhan. Sejumlah ungkapan yang bernada keagamaan tersebut antara lain adalah *manungsa sadrema nglakoni, sumendhe ing pepesthening pangeran, pasrah lan sumarah ing pangeran, wis ginaris ing pangeran* (Endraswara 2006, 43).

Budaya Jawa sangat dipengaruhi oleh sikap mental orang-orang Jawa sebagai pandangan hidupnya. Pandangan hidup orang Jawa akan menjadi acuan dalam bertindak dalam kehidupan. Jong (1976) dalam Endraswara (2006: 43) mengemukakan bahwa unsur sentral kebudayaan Jawa adalah sikap *riila* (rela), *nrima* (menerima), dan *sabar*. Hal ini akan mendasari segala gerak dan langkah orang Jawa dalam segala hal. *Riila* disebut juga *eklas*, yaitu kesediaan menyerahkan segala milik, kemampuan dan hasil karya kepada Tuhan. *Nrima* berarti merasa puas dengan nasib dan kewajiban yang telah ada, tidak memberontak, tapi mengucapkan *matur nuwun* (terima kasih). *Sabar*, menunjukkan ketiadaan hasrat, ketiadaan nafsu yang bergolak.

Sementara menurut Sumodiningrat (2003, 8) para ahli kebudayaan baik dari luar maupun yang ada di dalam negeri memiliki kesamaan dalam memandang konsep inti (*central concept*) nilai-nilai moral budaya Jawa yang diidealkan (lihat Mulder; Gertz 1981; Anderson 1965; FM Suseno 2001; Koentjaraningrat 1994, Hamengku Buwana 2008). Kesamaan pandangan tersebut bisa ditarik sebagai *central concept* budaya Jawa pada umumnya, yaitu: *pertama* budaya Jawa mendasarkan diri pada **harmonisasi**. Menurut Jatman (2005, 139) biasanya disebutkan bahwa budaya Jawa adalah anti-konflik karena di dalamnya mempunyai tujuan ideal bahwa dunia ini harus ditata secara harmonis baik antara *jagad cilik* (jiwa, pikiran, hati nurani) maupun *jagad gedhe* (komunitas, masyarakat). *Kedua*,

budaya Jawa dalam konteks modern lebih sesuai dengan paradigma **struktural fungsional** yang berasumsi bahwa setiap orang atau lembaga memiliki tempatnya masing-masing dan ia harus berperilaku atau bekerja sesuai dengan tempat keberadaannya. *Ketiga*, budaya Jawa menghargai hal-hal atau nilai-nilai yang bersifat **transendental**. Maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan transenden, yang bukan dunia materi tetapi metafisis.

Di samping sikap mental, orang Jawa juga memiliki etos⁴ kerja yang kuat dan disiplin tinggi (Raillon 2001: 223-224). Etos kerja ini mulai diajarkan pertama kalinya oleh para orang tua kepada anaknya ketika mereka sudah berumur *akil baligh*. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anaknya tersebut adalah terkait dengan kewajiban dalam mencari penghidupan (pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari). Mereka akan terus mendorong anaknya dengan memberikan nilai-nilai yang arif dan memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan sebagai *tuladha* (contoh). Kata-kata arif yang sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya agar mau bekerja, misalnya *ana dina ana upa*, artinya ada hari pasti ada rizqi; *aja sangga uang* “jangan berpangku tangan”; *obah-mamah*, lebih lengkapnya dalam sebuah nasehat *sing sapa gelem obah bakal mamah*, artinya siapa yang mau berusaha (bekerja) pasti akan makan (Prabowo, 2003: 23). Nasehat tersebut memiliki arti yang sangat dalam. *Obah* yang berarti bergerak, menunjukkan bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan *mamah* (makan) yang berarti rizki.

Dalam pergaulan bisnis orang Jawa secara turun temurun menjunjung tinggi filosofi *tuna satak bathi sanak* (Prabowo, 2003: 23). *Unen-unen* (ungkapan) tersebut biasa

⁴ Etos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai-nilai yang mendasari seseorang atau sekelompok orang (Bartens 2005: 225-226). Etos menunjukkan kepada kepada suasana khas yang meliputi kerja atau profesi dan perlu ditekankan bahwa kata suasana harus dipahami dalam arti baik secara moral. Magnis-Suseno (1992: 120) menjelaskan kesamaan antara sikap moral dengan etos, namun tidak identik. Sikap moral menegaskan orientasi pada norma-norma sebagai suatu standar yang harus diikuti, sementara etos menegaskan sikap yang sudah mantap dan atau sudah menjadi kebiasaan, suatu hal yang nyata-nyata mempengaruhi, dan menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang mendekati atau melakukan sesuatu.

dijumpai dalam komunikasi para *bakul* (pedagang) dan pembeli di pasar-pasar tradisional Jawa. Bahkan kalimat ini tidak hanya diungkapkan secara tekstual melalui wicara, melainkan dalam pergaulan bisnis yang lebih luas dipraktekkan sebagai etos bisnis (Suratno dan Astiyanto 2009: 269). Seperti diungkapkan Suratno dan Astiyanto (2009, 270) bahwa mengingat kondisi sekarang ini maka ajaran ini masih relevan diaktualisasikan. Tujuannya adalah agar hidup tidak *ngaya* (terlalu bernafsu), melainkan *samadya* (sederhana).

Secara etimologi, ungkapan tersebut terbentuk dari empat kata, yaitu *tuna* (rugi), *satak* (uang), *bathi* (laba atau untung), dan *sanak* (saudara). Secara utuh dapat diartikan, rugi uang (asalkan) untung saudara. Ungkapan ini konon muncul pertama kali pada saat Kanjeng Syaikh Siti Jenar menjual hasil pertaniannya kepada muridnya (Mandaru sebagaimana dikutip Pitoyo 2008, 149). Menjelang ajal kematiannya Syaikh Siti Jenar membagi-bagikan kekayaannya demi membela rakyat miskin pada waktu itu. Hal ini sebagai perwujudan filsafat yang dia diajarkan-*manunggaling kawulo-Gusti*.

Ajaran ini menyiratkan bahwa keuntungan (laba) yang selama ini direferensikan oleh masyarakat modern pada umumnya dalam bentuk materi (baca: uang), namun tidak mutlak bagi orang Jawa. Jika pada umumnya para kapitalis menyimbolkan bertambahnya kekayaan (aset) akan ekuivalen meningkatnya ekuitas, sebaliknya kekayaan bagi orang Jawa disimbolkan dengan bertambahnya saudara.

Esensi dari ajaran ini adalah pada dua kata terakhir yaitu *bathi sanak*. Untung persaudaraan —bukan materi—itulah intinya. Karena tidak hanya berorientasi pada materi maka tidak ada pihak yang 'dituduh' sebagai pusat kepentingan. Semua pihak berada dalam kedudukan yang sama yaitu menciptakan kondisi yang **harmoni** bagi semua kepentingan (Pitoyo 2008, 140). Masing-masing pihak bersedia mengikatkan diri manunggal bersaudara.

Tuna satak bathi sanak merupakan landasan filosofi bagi pedagang Jawa yang perilakunya merujuk pada tiga *central concept*, yaitu konsep harmoni, struktural fungsional, dan transenden (Pitoyo 2008, 142). Harmoni dalam pengertian *tuna satak bathi sanak* mengandung pengertian bahwa bagi pedagang lebih baik kehilangan uang atau merugi sementara untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan pelanggannya (Suratno dan Astiyanto 2009, 269). Sikap 'mengalah' tersebut bagi pedagang dilandasi oleh konsep struktural fungsional, yaitu sebagai pedagang harus memiliki karakter *empan papan* artinya mampu menempatkan diri sesuai dengan posisinya, yaitu sebagai pelayan, yang tujuannya adalah memuaskan pelanggan (Suratno dan Astiyanto 2009, 269). Semua perilaku luhur dalam berdagang, bagi orang Jawa senantiasa merupakan *urip mung sadrema nglakoni*, artinya hidup hanya sekedar menjalankan apa yang sudah ditakdirkan oleh *Gusti* (Suratno dan Astiyanto 2009, 269). Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan menipu timbangan, harga maupun kualitas barang. Hal ini menunjukkan konsep transenden mempengaruhi perilaku bisnis orang Jawa.

Untuk mencapai pada tataran harmoni terdapat karakter orang Jawa dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia yang saling menguntungkan. Karakter tersebut adalah prinsip-prinsip yang senantiasa dipegang teguh oleh orang Jawa, yaitu: 1) prinsip *eling* kepada *Gusti*, artinya selalu mengingat TuhanNya dalam setiap gerak dan langkahnya, 2) Prinsip kejujuran, dan 3) prinsip *gemi lan nastiti*, artinya pandai berhemat dan cermat dalam pengeluaran pengelolaan usaha sehingga efisien (Pitoyo 2008, 146)

Pada tataran praksis etos berbisnis orang Jawa sangat memegang prinsip-prinsip leluhurnya. Misal, ketika memulai untuk melakukan aktivitas bisnis para orang tua mengingatkan *Gusti ora sare* "Tuhan tidak tidur. Ungkapan ini memiliki makna bahwa kita harus memulai aktivitas dengan memohon apa yang kita inginkan. Di samping itu ungkapan tersebut memiliki nuansa persuasif agar

seseorang selalu berhati-hati sebelum berbuat (Suratno dan Astiyanto, 2009: 93). Tuhan selalu mengawasi sehingga manusia harus memikirkan apakah tindakan yang dilakukannya berpengaruh baik atau buruk, baik bagi dirinya maupun orang lain.

Cita-cita yang diidealkan *tuna satak bathi sanak* tidaklah cukup berhenti pada kondisi harmoni saja. Dalam arti bukan sekedar perpaduan antara *jagad* kecil (mikro kosmos) dan *jagad* besar (makro kosmos) tetapi juga keserasian di dalam lingkungan hidup batiniah sehingga secara keseluruhan dalam bahasa Jawa di sebut *tatatentrem* (Jawa: ketenangan lahir batin). Bagi orang Jawa kemampuan menciptakan kondisi yang anti-konflik belumlah cukup kecuali diiringi dengan mewujudkan *urip tulung tinulung*, artinya hidup harus saling tolong menolong (Suratno dan Astiyanto, 2009: 278). Ajaran budaya Jawa tersebut sesuai dengan kodrat manusia yang tidak mampu hidup seorang diri, tapi membutuhkan pertolongan orang lain. Intinya, *tatatentrem* menurut pandangan *tuna satak bathi sanak* adalah di samping menghindari konflik dengan pelanggan juga bersedia dengan ikhlas mendistribusikan kesejahteraan kepada pihak lain yang secara langsung tidak memberikan kontribusi apa pun (Suratno dan Astiyanto, 2009: 93). Karena dalam jangka panjang mereka akan menjadi pihak yang senantiasa mendukung usaha bisnis yang kita jalankan sehingga tercipta ketenangan lahir batin.

Konsep *tatatentrem* sebagaimana dijelaskan mengacu pada pemenuhan hak (kepentingan) pihak yang tidak secara langsung terkait dengan bisnis. Artinya, tidak hanya fokus kepada pihak yang hanya mendatangkan keuntungan saja melainkan juga siapa pun yang berada di lingkungan aktivitas bisnis. Penelitian Daryono (2007) tentang etos bisnis Jawa dalam pemikiran Sri Mangkunegaran IV menyebutkan bahwa acuan teoritis etos bisnis tersebut Jawa mengacu pada *the stakeholders benefit*, artinya manfaat bagi *stakeholders* yang teori manajemennya disebut sebagai *stakeholder-approach*. Dalam teori manajemen tersebut kegiatan bisnis memiliki nilai instrinsik sendiri (misalnya, memproduksi sesuatu yang berguna bagi

masyarakat), maka aktivitas itu tidak baru menjadi bernilai karena membawa untung (Daryono 2007, 182). Maksudnya, keuntungan (laba) hanya sekedar sebagai salah satu acuan dasar bagi motivasi melaksanakan bisnisnya.

Pembahasan tentang konsep harmoni dan *tatatentrem* mengantarkan kepada sebuah simpulan bahwa konsep tersebut menggambarkan nilai-nilai intrinsik, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam diri yang mendorong untuk berbuat baik dan benar. Yang pada akhirnya tergambar oleh individu atau kelompok lain dalam memandang nilai-nilai yang melekat pada diri, atau nilai-nilai ekstrinsik. Jadi nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dapat di rangkum sebagai berikut:

Tabel 1.

Nilai-nilai Ekstrinsik dan Intrinsik filosofi *tuna satak bathi sanak*

Konsep	Nilai-nilai Ekstrinsik	Nilai-nilai Intrinsik
Harmoni	Jujur dalam kualitas dan timbangan; Produk halal; Peduli terhadap lingkungan	Eling dengan <i>Gusti</i> ; anti-konflik; keinginan hidup untuk melayani
<i>Tatatentrem</i>	Melibatkan masyarakat di lingkungannya sehingga ikut merasakan kesejahteraan.	<i>Tulung tinulung</i> ; gotong royong, hidup bersama

B. Permasalahan

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang di atas, rekonseptualisasi realitas sosial perlu dilakukan dalam *setting* alamiah untuk mendapatkan konsep kesatuan usaha yang betul-betul merupakan abstraksi lingkungan di mana akuntansi dipraktikkan. Hal ini sangat penting dilakukan karena konsep kesatuan usaha akan men-derivasi konsep-konsep dasar akuntansi lain yang koheren.

Penelitian ini dilakukan pada *setting* alamiah untuk membaca realitas sosial konsep *accounting entity*. Pembacaan realitas sosial lebih difokuskan pada konsep

accounting entity yang membentuk realitas konflik hukum dan ekonomi dan tanggungjawab manajemen. Pembacaan dilakukan pada lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, yaitu filsafat Jawa: *tuna satak bathi sanak*. Sebagaimana dijelaskan bahwa cita-cita ideal dari landasan filosofi bisnis orang Jawa tersebut adalah tercapainya suatu kondisi harmoni (anti-konflik) atau kondisi yang melampauinya, yaitu *tatatentrem* (ketenangan lahir batin). Cita-cita ideal harmoni dan *tatatentrem* akan digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan rekonseptualisasi *accounting entity* terutama pada realitas personifikasi perbuatan hukum dan ekonomi dan tanggungjawab manajemen. Berpijak pada pemahaman tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut:

"Bagaimana rumusan konsep dasar kesatuan akuntansi yang berbasis pada filsafat Jawa *tuna satak bathi sanak*?"

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada membaca kembali konsep *accounting entity* yang menciptakan realitas sosial (*socially constructing*) perbuatan hukum dan ekonomi dan tanggungjawab manajemen. Hasil dari membaca tersebut kemudian direfleksikan dengan nilai-nilai kearifan filsafat Jawa *tuna satak bathi sanak* yang memiliki cita-cita ideal harmoni dan *tatatentrem*. Hasilnya akan berupa penemuan rumusan konsep kesatuan akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan filsafat Jawa. Temuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas konsep dasar kesatuan akuntansi. Hal ini karena setiap wilayah memiliki realitas sosial yang unik, sehingga praktik akuntansi yang dijalankan juga sebenarnya memiliki keunikan yang berbeda dengan wilayah lain